

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman)**

ARTIKEL



Oleh

FERAWATI FAJRIN
2010/57689

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2014**

HALAMAN PENGESAHAN ARTIKEL

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman)**

Oleh:

Ferawati Fajrin

57689

**Artikel ini disusun berdasarkan skripsi/tesis untuk persyaratan wisuda
periode September 2014 dan telah diperiksa/disetujui oleh kedua
pembimbing**

Padang, Mei 2014

Pembimbing I


Lili Anita, SE, M.Si, Ak
NIP. 19710302199802 2 001

Pembimbing II


Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204200801 2 011

**PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH TERHADAP NILAI
INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
(Studi Empiris Kabupaten Padang Pariaman)**

FERAWATI FAJRIN

*Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus Air Tawar
email: ferawatiazzahra@yahoo.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Populasi dalam penelitian ini adalah (SKPD) di Kabupaten Padang Pariaman. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian dan staf bagian akuntansi, maka didapat responden sebanyak 64 orang responden. Teknis analisis data yang digunakan adalah regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukkan: 1) sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dan 2) pengawasan keuangan daerah mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Kata kunci : Sistem Pengendalian Intern, Pengawasan Keuangan dan Nilai Informasi Laporan Keuangan

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of the internal control system of the government and financial oversight of the value of local government financial reporting information.

The population in this study is on education in the district of Padang Pariaman. The sample in this study is the head of the accounting department and staff, the importance of the respondents 64 respondents. Technical analysis of the data used is multiple regression.

The results showed: 1) government's system of internal control positive significant effect on the value of the information the government's financial statements, and 2) financial supervision area has a significant positive effect on the value of the government's financial statement information.

Keywords : Internal Control Systems, Supervisory Regional Finance and Information Value of Financial Statement.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, adalah dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Menurut Suwardjono (2005), nilai informasi adalah kemampuan informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebut dalam Rerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 yang terdiri dari: (a) relevan, (b) andal, (c) dapat dibandingkan, dan (d) dapat dipahami.

Menurut Arfianti (2011), nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh: kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian intern, dan pengawasan keuangan daerah.

Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008, adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan untuk menyajikan informasi keuangan yang handal kepada para pemakai agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan media tertentu yang dipandang relevan,

yaitu pengawasan keuangan daerah (Tuasikal, 2007).

Pada penelitian ini penulis memfokuskan meneliti pengawasan yang dilakukan oleh pengawas internal yaitu pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat.

Melihat fenomena yang terjadi di pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman terhadap opini yang diterbitkan oleh BPK yaitu memperoleh opini WDP dari tahun ke tahun, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauhmana pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Oleh karena itu penulis ingin menuangkan hal tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten Padang Pariaman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Sejauhmana sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah?.
2. Sejauhmana pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah?

II. KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL, DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

a. Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah

Laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Adapun macam-macam laporan keuangan pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

- a) Laporan Realisasi Anggaran
- b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- c) Neraca
- d) Laporan Operasional
- e) Laporan Arus Kas
- f) Laporan Perubahan Ekuitas
- g) Catatan Atas Laporan Keuangan

b. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Mardiasmo (2002:161) sebagai berikut:

1. Kepatuhan dan Pengelolaan (*Compliance and Stewardship*)
2. Akuntabilitas dan Pelaporan Retrospektif (*Accountability and Retrospective Reporting*)
3. Perencanaan dan Informasi Otorisasi (*Planning and Authorization Information*)
4. Kelangsungan Organisasi (*Viability*)
5. Hubungan Masyarakat (*Public Relation*)
6. Sumber Fakta dan Gambaran (*Source of Facts and Figures*)

c. Nilai Informasi Laporan Keuangan

Menurut Suwardjono (2005), suatu informasi dikatakan mempunyai nilai bila dapat digunakan untuk

pengambilan keputusan oleh pemakainya. Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang merupakan prasyarat normatif sebagaimana disebutkan dalam Rangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 antara lain : relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami.

Suatu informasi harus bermanfaat bagi pemakai, artinya bahwa informasi harus mempunyai nilai. Unsur-unsur pembentukan kualitas informasi menurut Suwardjono (2005) dalam Dewi (2012) adalah sebagai berikut:

1. Keterpahaman
2. Keberpautan
3. Nilai prediktif
4. Nilai balikan
5. Ketepatanwaktuan
6. Keterandalan
7. Ketepatan penyimbolan
8. Keterujian
9. Kenetralan
10. Keterbandingan
11. Materialitas

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

a. Pengertian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah "Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. "Se-

dangkan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

b. Tujuan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai tentang:

1. Kegiatan yang efektif dan efisien
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan
3. Pengamanan aset negara
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

c. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut PP No. 60 tahun 2008 (dalam BPKP), adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

3. Pengawasan Keuangan Daerah

a. Pengertian Pengawasan Keuangan daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 th 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kab/Kota, pengawas intern pemerintah daerah dilakukan oleh inspektorat yang mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintah desa dan pelaksanaan urusan desa. Untuk

menyelenggarakan tugas pokok tersebut inspektorat mempunyai fungsi:

1. Perencanaan program pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

b. Jenis-jenis Pengawasan

Menurut Baswir (2000), jenis-jenis pengawasan dapat dibedakan berdasarkan objeknya, sifatnya, ruang lingkupnya, dan metode pengawasannya.

c. Tujuan Pengawasan Keuangan Daerah

Fikri (2011) dalam Dewi (2012), menyebutkan bahwa tujuan pengawasan APBD adalah untuk :

1. Menjaga agar anggaran disusun benar-benar dijalankan.
2. Menjaga agar pelaksanaan APBD sesuai dengan anggaran yang telah digariskan, dan
3. Menjaga agar pelaksanaan APBD benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.

d. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan merupakan tahap integral dengan keseluruhan tahap pada penyusunan dan pelaporan APBD.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007, yang direvisi menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, yang termasuk dalam ruang lingkup pengawasan pengelolaan keuangan daerah adalah:

1. Pengaturan dan penetapan

2. Perencanaan dan penganggaran
3. Pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah
4. Pertanggungjawaban keuangan daerah

Sebagai pengawasan intern, Inspektorat Daerah yang bekerja dalam organisasi pemerintah daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- a. Melakukan pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.
- b. Menentukan apakah kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak (kepala daerah) telah dipatuhi dan berjalan sesuai dengan rencana.
- c. Menentukan baik atau tidaknya pemeliharaan terhadap kekayaan daerah
- d. Menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan pemerintah daerah
- e. Menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai unit/satuan kerja sebagai bagian yang integral dalam organisasi pemerintah daerah.

4. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian Arfianti (2011) meneliti tentang faktor yang mempengaruhi nilai informasi laporan keuangan pemerintah, hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap keandalan nilai informasi keuangan pemerintah daerah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2010), meneliti tentang pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah, hasil penelitian ini membuktikan

bahwa pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah.

B. Hubungan Antar Variabel untuk Pengembangan Hipotesis

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Menurut PP Nomor 60 tahun 2008 sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai. Apabila SPI dapat diterapkan dengan baik, maka akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai informasi yang baik, dan begitu pula sebaliknya.

Penelitian Indriasari (2008), menjelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

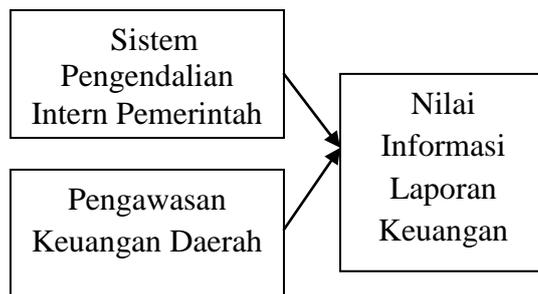
2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan meneliti tentang

pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat sebagai pengawas intern pemerintah. Pengawasan keuangan pemerintah daerah terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan. Jadi semakin baik pengawasan keuangan daerah pemerintah, maka akan semakin baik pula nilai informasi laporan keuangan daerahnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewi (2012), menjelaskan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

3. Kerangka Konseptual



Gambar 1
Kerangka Konseptual

4. Hipotesis Penelitian

H1: Penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

H2: Pengawasan keuangan daerah pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini, tergolong penelitian kausatif.

B. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dari penelitian ini adalah SKPD di Kabupaten Padang Pariaman. Yang berjumlah 35 SKPD.

2. Sampel

Teknik pengambilan sampel adalah *total sampling*, dimana seluruh SKPD yang terdapat di Kabupaten Padang Pariaman dijadikan sampel. Adapun jumlah responden 70 Responden.

C. Variabel dan Data Penelitian

1. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini adalah variabel terikat dan variabel bebas.

2. Data Penelitian

- a. Jenis Data adalah data subjek.
- b. Sumber Data adalah data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan kuisioner tertutup.

E. Pengukuran Variabel

Pengukuran variabel dalam penelitian ini menggunakan skala likert.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuisioner.

G. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Uji validitas pada penelitian ini menggunakan uji *connected product*

moment. Jika r hitung $>$ r tabel dan nilai positif maka butir/pertanyaan/indikator tersebut dinyatakan valid. Untuk uji validitas ini digunakan rumus *Product Moment* sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = koefisien korelasi

n = besar sampel

x = variabel bebas ($X_1, X_2 \dots X_n$)

Y = nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah

2. Uji Reliabilitas

Untuk uji reliabilitas digunakan rumus *Cronbach's Alpha*.

$$r = \left[\frac{n}{n-1} \right] \left[1 - \frac{\sum \sigma b^2}{\sigma 1^2} \right]$$

Keterangan :

r = reliabilitas instrumen

n = banyaknya butir pertanyaan

$\sum \sigma b^2$ = jumlah varians butir

$\sigma 1^2$ = varians total

Menurut Sekaran (2003), cara untuk mengukur reliabilitas dengan *Croanbrach's Alpha* dengan kriteria sebagai berikut :

- Kurang dari 0,6 tidak reliabel
- 0,6-0,7 akseptabel
- 0,7-0,8 baik
- Lebih dari 0,8 reliabel

H. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan *one sample kolmogorov-smirnov test* dengan melihat tingkat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini dengan melihat *probability*

asympt.sig (2-tailed) $>$ 0,05 maka data mempunyai distribusi yang normal.

2. Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi adanya korelasi variabel-variabel bebas diantara satu dengan yang lainnya, maka salah satu variabel bebas tersebut dieliminir untuk menguji adanya multikolinieritas dilakukan dengan melihat VIF (*Variance Inflating Factors*) $<$ 10 dan *tolerance* $>$ 0,10.

3. Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi adanya heterokedastisitas dapat menggunakan uji glejser. Dalam uji ini, apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terdapat gejala heterokedastisitas, modal yang baik adalah tidak terjadinya heterokedastisitas.

I. Teknik Analisa Data

1. Analisis Deskriptif

a. verifikasi data

Yaitu memeriksa kembali kuisioner yang telah diisi oleh responden.

b. Menghitung nilai jawaban

- Menghitung frekuensi dari jawaban yang diberikan responden atas setiap item pertanyaan yang diajukan.
- Menghitung rata-rata besar skor total item dengan menggunakan rumus:

rumus:

$$\frac{(SS \times 5) + (S \times 4) + (RR \times 3) + (TS \times 2) + (STS \times 1)}{15}$$

15

- Menghitung nilai rerata jawaban responden dengan menggunakan rumus :

$$\text{Mean} = \frac{\sum_{h=1}^n X_i}{n}$$

Keterangan :

X_1 = Skor total

N = Jumlah responden

- d. Menghitung nilai TCR masing-masing kategori jawaban dari deskriptif variabel, maka digunakan rumus :

$$TCR = \frac{Rs}{n} \times 100\%$$

Dimana :

TCR = Tingkat Capaian Responden

Rs = Rata-rata skor jawaban responden (rerata)

n = nilai skor jawaban

Nilai persentase dimasukkan ke dalam kriteria sebagai berikut :

- Interval jawaban responden 76-100% kategori jawabannya baik
- Interval jawaban responden 56-75% kategori jawabannya cukup baik
- Interval jawaban responden <56% kategori jawabannya kurang baik

2 . Metode Analisis Data

a. Koefisien Determinansi (R^2)

Koefisien Determinansi (R^2) digunakan untuk mengetahui kontribusi dari variabel bebas terhadap variabel terikat dilihat dari *Adjusted R Square*nya. Pemilihan nilai *Adjusted R Square* karena penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan jumlah variabel lebih dari satu koefisien determinansi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. *Adjusted R²* berarti R^2 sudah disesuaikan dengan derajat bebas dari masing-masing jumlah kuadrat yang tercakup di dalam perhitungan *adjusted R²* untuk membandingkan dua R^2 , maka harus memperhatikan banyaknya variabel x yang ada dalam model.

b. Koefisien Regresi Berganda

Data diolah dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 15. Persamaan model regresi berganda yang digunakan adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Dimana :

Y : Nilai informasi laporan keuangan

a : Konstanta

b_1, b_2 : Koefisien regresi dari variabel independen

X_1 : Pistem pengendalian intern pemerintah

X_2 : Pengawasan keuangan daerah

e : Epsilon (variabel-variabel Independen lain yang tidak di ukur dalam penelitian yang mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen).

c. Uji F (F-test)

Uji F digunakan untuk melihat model regresi yang digunakan sudah signifikan atau belum, dengan ketentuan bahwa jika *p value* < (α)= 0,05 dan $f_{hitung} > F_{tabel}$, berarti model tersebut sudah fix signifikan dan bisa digunakan untuk menguji hipotesis. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian hipotesis adalah 95% atau (α)= 5% (0,05).

3. Uji Hipotesis

Uji t (t-test)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel tidak bebas dengan variabel lain dianggap konstan, dengan asumsi bahwa jika signifikan nilai t hitung yang dapat dilihat dari analisis regresi menunjukkan kecil dari $\alpha = 5\%$, berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Dengan tingkat kepercayaan untuk pengujian

hipotesis adalah 95% atau (α)= 0,05 (5%).

Dengan kriteria sebagai berikut :

- 1). Jika tingkat signifikansi $< \alpha$ 0,05, t hitung $> t$ tabel dan koefisien regresi (β) positif maka hipotesis diterima yang berarti tersedia cukup bukti untuk menolak H_0 pada pengujian hipotesis 1,2 atau dengan kata lain tersedia bukti untuk menerima h_1, h_2 .
- 2). Jika tingkat signifikansi $< 0,05$, t hitung $> t$ tabel dan koefisien regresi (β) negatif maka hipotesis ditolak dan berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.
- 3). Jika tingkat signifikansi $> \alpha$ 0,05 dan t hitung $< t$ tabel positif maka hipotesis ditolak yang berarti tidak tersedia cukup bukti untuk menerima hipotesis.

J. Defenisi Operasional

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah adalah laporan keuangan yang memiliki informasi yang bermanfaat bagi pemakai untuk pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya.
2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan/*fraud*
3. Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan

secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Jumlah populasi pada penelitian ini adalah 35 SKPD di Kabupaten Padang Pariaman.

Jumlah kuisioner yang dibagikan adalah 70 lembar untuk 35 SKPD, tetapi dari kuisioner yang dibagikan tersebut kuisioner yang kembali dan mengisi lengkap adalah 64 lembar rentang waktu penyebaran dan pengumpulan kuisioner adalah tanggal 08–30 Januari 2014.

B. Demografi Responden

1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Dari sisi usia, responden yang berusia 20-30 tahun berjumlah 9 orang atau 14,1%. Usia 31-40 tahun berjumlah 25 orang atau 39,1% dan responden yang berusia di atas 41 tahun yaitu berjumlah 30 orang. Sehingga dapat disimpulkan karakteristik responden berdasarkan usia lebih didominasi 41 tahun ke atas.

2. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang ada lebih didominasi oleh perempuan dengan jumlah 40 orang atau 62,5% dari pada laki-laki yang hanya berjumlah 24 orang atau 37,5%.

3. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

Berdasarkan data yang ada responden terbanyak berada pada Strata 1 (S1) yaitu 39 orang atau 60,9% dan yang paling rendah berada pada

Diploma Tiga (D3) yaitu enam orang atau 9,38%.

4. Karakteristik Responden Berdasarkan Bidang Keahlian

Berdasarkan data yang ada dapat kita lihat bahwa bidang keahlian pendidikan yang dimiliki responden terbanyak adalah non-akuntansi dengan jumlah 45 orang atau 70,31% atau lebih dari 50%, sedangkan bidang keahlian akuntansi sendiri hanya 19 orang atau 29,69%.

5. Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berdasarkan data yang ada responden yang bekerja di atas 5 tahun berjumlah 19 orang atau 29,69%, responden yang bekerja selama 4 tahun berjumlah 18 orang atau 28,13%, responden yang bekerja selama 3 tahun berjumlah 10 orang atau 15,62% dan responden yang bekerja kurang atau sama dengan 2 tahun berjumlah 17 orang atau 26,56%.

C. Deskripsi Variabel Penelitian

1. Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah (Y)

Dalam Penelitian ini terdapat 10 item pernyataan untuk variabel nilai informasi laporan keuangan pemerintah, item pernyataan nomor 2 dengan tingkat capaian responden tertinggi yaitu 85,4%. Sedangkan tingkat capaian responden terendah yaitu pada pernyataan nomor 9 yaitu 75%. Ini berarti bahwa SKPD mampu menyusun laporan keuangan secara lengkap/laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan poin terendah berada pada informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan SKPD bebas dari kesalahan yang bersifat material. Secara keseluruhan nilai

informasi laporan keuangan pemerintah dapat dikategorikan baik dengan TCR 81,76%.

2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X₁)

Dalam Penelitian ini terdapat 15 item pernyataan untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah, dimana dapat dikatakan tingkat capaian responden baik, hal ini dilihat pada item pernyataan nomor 3 yaitu dengan tingkat capaian responden tertinggi 87,6%, sedangkan tingkat capaian terendah yaitu item nomor 11 dengan tingkat capaian responden sebesar 65,4%. Hal ini berarti bahwa satuan pengawas intern terdiri dari staf yang kompeten, dapat dipercaya, dan tanggap dengan perubahan, sedangkan kurangnya identifikasi dan pengkomunikasian informasi agar tanggungjawab dapat dilaksanakan mendapat point terendah. Secara keseluruhan sistem pengendalian intern pemerintah dikategorikan baik dengan TCR 80,55%.

3. Pengawasan Keuangan Daerah (X₂)

Dalam Penelitian ini terdapat 12 item pernyataan untuk variabel pengawasan keuangan daerah, dimana item pernyataan no. 7 dengan tingkat capaian responden tertinggi yaitu 84,4%, berarti Inspektorat memeriksa apakah terdapat laporan penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran dan Belanja. Sedangkan tingkat capaian responden terendah item pernyataan no. 12 yaitu 79,4%, berarti Inspektorat memeriksa apakah sistem informasi yang dilaksanakan dapat menghasilkan informasi yang tepat, lengkap, dan akurat masih rendah.

Secara keseluruhan pengawasan keuangan daerah dapat dikategorikan baik dengan TCR 81,87%.

D. Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Kuisisioner yang kembali dan dapat diolah sebanyak 64. Untuk melihat validitas dari masing-masing item kuisisioner digunakan *Corrected Item-Total Correlation*. Jika $r_{hit} > r_{tabel}$, maka dikatakan valid. r_{tabel} untuk $n=64$ adalah 0,207.

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat nilai terkecil dari *Corrected Item-Total Correlation* untuk masing-masing instrumen yaitu lebih dari 0,207. Untuk instrumen sistem pengendalian intern pemerintahan (X_1) diketahui nilai *Corrected Item-Total Correlation* sebesar 0,457, untuk pengawasan keuangan daerah (X_2) adalah sebesar 0,493, dan untuk nilai informasi laporan keuangan adalah sebesar 0,424. Jadi dapat dikatakan bahwa semua item pernyataan variabel Y, X_1 dan X_2 adalah valid.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah tingkat kestabilan suatu alat pengukur dalam mengukur suatu gejala/kejadian. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat pengukur, semakin stabil pula alat pengukur tersebut. Menurut Nunnally (1967) dalam Ghazali (2001), suatu dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,6$.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa semua variabel mempunyai *Cronbach Alpha* yang cukup besar yaitu di atas 0,60 sehingga dapat dikatakan semua konsep pengukur masing-masing variabel dari kuisisioner adalah reliabel sehingga untuk

selanjutnya item-item pada masing-masing konsep variabel tersebut layak digunakan sebagai alat ukur.

E. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan metode *Kolmogorav-Smirnov test*.

Berdasarkan data yang ada terlihat bahwa hasil uji normalitas menunjukkan level signifikansi lebih besar dari α ($\alpha = 0,05$) yaitu 0,226 $> 0,05$ yang berarti bahwa data terdistribusi secara normal.

2. Uji Multikolinearitas

Dengan melihat nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *tolerance* serta menganalisis matrix korelasi variabel-variabel bebas. Dari data yang ada dilihat variabel SPIP (X_1) dengan nilai (VIF) 3,132 dan *tolerance* $> 0,909$, sedangkan variabel Pengawasan keuangan daerah (X_2) sama dengan nilai (VIF) 3,132 dan *tolerance* $> 0,909$. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat korelasi variabel-variabel bebas antara satu dengan yang lainnya, atau variabel inde-penden pada penelitian ini bebas multikol.

3. Uji Heteroskedastisitas

Dengan uji *Glejser*. Pengujian ini membandingkan signifikan dari uji ini apabila hasilnya $\text{sig} > 0,05$ atau 5%. Jika signifikan di atas 5% maka disimpulkan model regresi tidak mengandung adanya heteroskedastisitas.

Berdasarkan data yang ada, dapat dilihat tidak ada variabel yang signifikan dalam regresi dengan variabel AbsUt. Tingkat signifikansi $> \alpha 0,05$, sehingga dapat disimpulkan

bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini terbebas dari heteroskedastisitas.

F. Teknik Analisis Data

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of The Estimate
1	.492(a)	.242	.217	2.434

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2014

Dari tabel di atas besarnya Adjusted R Square adalah 0,217. Hal ini mengidentifikasi bahwa kontribusi variabel sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah adalah sebesar 21,7%, sedangkan 78,3% lainnya ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak terdeteksi dalam penelitian ini.

2. Analisis Regresi Berganda

Koefisien Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients	T	Sig.
	B		
(Constant)	18,730	3,636	,001
SPIP	,136	2,067	,043
PKD	,284	3,531	,001

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas dapat dianalisis model estimasi sebagai berikut:

$$Y = 18,730 + 0,136 X_1 + 0,284 X_2 + e$$

Keterangan:

Y= nilai informasi laporan keuangan
 X_1 =sistem pengendalian intern pemerintah
 X_2 = pengawasan keuangan daerah

X_2 = pengawasan keuangan daerah

Dari persamaan di atas dapat dijelaskan bahwa:

a. Nilai konstanta sebesar 18,730 ini mengidentifikasi bahwa jika variabel independen yaitu sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah adalah 0 maka nilai informasi laporan keuangan adalah sebesar konstanta 18,730.

b. Koefisien sistem pengendalian intern pemerintah sebesar 0,136 ini mengidentifikasi setiap peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah akan mengakibatkan peningkatan nilai informasi laporan keuangan sebesar 0,136 dengan asumsi variabel lain konstan.

c. Koefisien pengawasan keuangan daerah sebesar 0,284 mengidentifikasi setiap peningkatan pengawasan keuangan daerah satu satuan akan mengakibatkan peningkatan nilai informasi laporan keuangan sebesar 0,284 dengan asumsi variabel lain konstan.

3. Uji F

Uji F Statistik

Model	Sum of Square	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	115,488	2	57,744	9,743	0,000 (a)
Residual	361,512	61	5,926		
Total	477,000	63			

Sumber: Data Primer yang diolah tahun 2014

Dari hasil pemrosesan data di atas, dapat dilihat bahwa Fhitung yaitu 9,743 dengan nilai signifikan yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen secara bersama-sama (simultan)

mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen.

4. Uji Hipotesis (*t-test*)

Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} adalah $\alpha = 0,05$ dengan derajat bebas (db) = $n - k = 64 - 2 = 62$ adalah 1,670, berdasarkan hasil analisis pada tabel 19 maka dapat diketahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen adalah sebagai berikut:

a. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1,670. Untuk variabel sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) nilai t_{hitung} adalah 2,067 dan nilai sig adalah 0,043. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,067 > 1,670$ atau nilai signifikansi $0,043 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai Positif yaitu 0,136. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan sistem pengendalian intern pemerintah (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis pertama (H_1) **diterima**.

b. Pengujian Hipotesis 2

Pengujian hipotesis dilakukan dengan membandingkan t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai sig $< 0,05$. Nilai t_{tabel} pada 0,05 adalah 1,670. Untuk variabel pengawasan keuangan daerah (X_2) nilai t_{hitung} adalah 3,531 dan nilai sig adalah 0,001. Dengan

demikian dapat dikatakan bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $3,531 > 1,670$ atau nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai positif yaitu 0,284. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah (X_2) berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan. Dengan demikian hipotesis kedua (H_2) **diterima**.

G. Pembahasan

1. Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, jika sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada SKPD di Kabupaten Padang Pariaman baik, dalam artian semua unsur-unsur dari SPIP (lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern), dijalankan dengan maksimal, maka akan tercipta nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 bahwa sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang terkait dengan laporan keuangan merupakan suatu proses yang didesain untuk memberikan keyakinan yang memadai atas keandalan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, yang akan menghasilkan laporan keuangan yang mempunyai nilai.

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Indriasari (2008) meneliti tentang pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah.

Dilihat dari distribusi frekuensi, bahwa sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden terhadap kuisioner yang disebarkan. Secara garis besar sistem pengendalian intern pemerintah pada SKPD di Kabupaten Padang Pariaman sudah baik.

Dari rata-rata TCR di atas sebagian besar responden menjawab setuju bahwa sistem pengendalian intern pemerintah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Artinya dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik, maka akan terwujud nilai informasi laporan keuangan yang baik. Agar sistem pengendalian intern pemerintah dapat berjalan dengan maksimal, maka diperlukan kesadaran dari semua pihak baik pimpinan maupun bawahan untuk melaksanakannya sehingga nantinya akan menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang baik pula.

2. Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan Pemerintah

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, jika pengawasan keuangan daerah khususnya pengawasan internal yang dilakukan oleh inspektorat pada SKPD di Kabupaten Padang Pariaman dengan baik dan menyeluruh maka akan tercipta nilai informasi laporan keuangan pemerintah yang baik pula.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah pasal 33 ayat 3 menyatakan bahwa APIP pada Kementerian Negara/Lembaga/Pemda melakukan review atas laporan keuangan dan kinerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan sebelum disampaikan Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam pasal 8 dan pasal 11. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dengan adanya pengawasan keuangan yang dilakukan oleh APIP maka diharapkan dapat memberikan keyakinan akan keandalan informasi dalam laporan keuangan pemerintah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Devi (2010), meneliti tentang pengaruh pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan pejabat penatausahaan keuangan dan pengawasan inspektorat berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi laporan keuangan daerah

Dilihat dari distribusi frekuensi, bahwa pengawasan keuangan daerah memiliki pengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, hal ini dapat dibuktikan dari jawaban responden terhadap kuisi-ner yang disebar. Secara garis besar pengawasan keuangan daerah pada SKPD di Kabupaten Padang Pariaman sudah baik.

Dari rata-rata TCR di atas sebagian besar responden menjawab setuju bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Artinya dengan pengawasan keuangan daerah yang baik yang dilakukan oleh aparat inspektorat sebagai pengawas internal pemerintah, maka akan terwujud nilai informasi laporan keuangan yang baik pula.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dalam pengujian hipotesis adalah signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pengawasan keuangan daerah dalam pengujian hipotesis mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah di Kabupaten Padang Pariaman.

B. Keterbatasan

Penelitian ini hanya menguji pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah, dari hasil uji koefisien determinasi terlihat bahwa pengaruh sistem pengendalian

intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah hanya 21,7%, sedangkan 78,3% dipengaruhi oleh variabel lainnya.

C. Saran

1. Dari hasil analisis data dan pembahasan, sistem pengendalian intern pemerintah mendukung terciptanya nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Namun, sistem pengendalian intern pemerintah, masih memerlukan sosialisasi lagi kepada semua lini instansi atau pegawai di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.
2. Dari hasil analisis data dan pembahasan, pengawasan keuangan daerah sudah mendukung terciptanya nilai informasi laporan keuangan pemerintah. Namun, masih diharapkan pengawasan keuangan daerah khususnya yang dilakukan oleh inspektorat agar lebih menyeluruh ke lini instansi atau pegawai di lingkungan Kabupaten Padang Pariaman.
3. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi pemerintahan mengenai nilai informasi laporan keuangan pemerintah.
4. Memperbanyak sampel sehingga kemampuan generalisasi untuk memperlihatkan nilai informasi laporan keuangan menjadi kuat.
5. Penelitian ini dapat dilakukan dengan menambahkan variabel lain yang tidak masuk dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfianti, Dita. 2011. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keu-*

- angan Pemerintah Daerah Pada SKPD di Kabupaten Batang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Badan Pemeriksaan Keuangan RI, 2006. *Konsep Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*
- Baswir, Revrison, 2000. *Akuntansi Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: BPF
- Bramasta. 2012. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dengan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebagai Variabel Intervening*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Deddi, Dkk. 2009. *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat
- Devi, Yenita. 2010. *Pengaruh Pengetahuan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Pengawasan Inspektorat Terhadap Nilai Informasi Laporan Keuangan SKPD*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Fikri, Miftahul, 2011. *Pengaruh SIKD dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kota Padang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, 2006. *Standar Akuntansi Pemerintah : Telaah Kritis* PP Nomor 24 Tahun 2005. Yogyakarta: BPF
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, BP UNDIP, Semarang.
- IHPS, (2012). *Daftar Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2007-2011*. Melalui <http://www.google.com> (25/09/2013)
- Indriasari, Desi. 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Jurnal SNA. Politeknik Negeri Sriwijaya Palembang
- Kuncoro, Mudrajat. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPF
- Pebriyani, Dewi. 2012. *Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang
- Tuasikal, Askam. 2007. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan*

Pengelolaan Keuangan Terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku. Jurnal Keuangan dan Perbankan. Vol 10 No.1 hal 66-87

Ulfa, Sentia. 2012. *Pengaruh Peran Inspektorat dan Implementasi Good Governance Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

Winidyaningrum. 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemda Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*. Jurnal SNA. STIE ST. Pignatelli: Surakarta

Yurianto, Rifa. 2012. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pimpinan SKPD*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

-----, Belum tindaklanjuti LHP BPK-RI, Penjara Menanti. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

-----, Inilah Opini BPK terhadap 17 Daerah di Sumbar . Melalui <http://www.google.com> (2/12/2013)

Peraturan dan Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006. Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah. Melalui

<http://www.google.com>

(29/10/2013)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 8 Tahun 2009. “Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 th 2007. Tentang Pedoam Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Propinsi dan Kab/Kota. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Melalui <http://www.google.com> (4/12/2013)

Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

-----, Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)

-----, Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah . Melalui <http://www.google.com> (29/10/2013)